

NASIONALISME PEMERSATU KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA (1996-1999)

Oleh: **Nunik Esti Utami***

Nunikestiutami87@gmail.com

*Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, IKIP PGRI Pontianak

ABSTRAK

Nasionalisme pemersatu Konflik sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan deskriptif naratif. Metode sejarah yaitu heuristik, ialah kegiatan menghimpun sumber-sumber sejarah, kritik (verifikasi) meneliti apakah sumber-sumber itu sejati, baik bentuk maupun isinya, interpretasi, untuk menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-fakta yang diverifikasi, historiografi, penyajian hasil sintesis yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah sejarah. Hasil penelitian ini adalah pada titik simpang kritis ketiga yang menyertai akhir rezim Orde Baru, sebagian kelompok tersebut adalah para peserta korban dari kekerasan etnis. Suku Dayak yang terpinggirkan berperang melawan para pendatang suku Madura di pulau Kalimantan pada tahun 1996-1999. Mereka yang terpinggirkan meliputi sejumlah besar kelompok yang dianggap komunitas-komunitas suku atau terpencil, kekuasaan otoriter di bawah demokrasi dipimpin dan Orde Baru mempersempit paksaan institusional terhadap Aceh dan mempromosikan integrasi yang lebih besar ke dalam model nasional Indonesia. Status khusus Aceh dengan cepat pudar akibat sentralisasi kekuasaan politik, ekonomi dan militer.

Kata Kunci: Nasionalisme, Konflik Sosial

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki beranekaragam suku bangsa dan etnis yang memiliki karakteristik tersendiri. Adanya keberagaman bangsa Indonesia di karenakan keadaan geografis Indonesia yang memiliki kepulauan yang di batasi oleh selat dan laut, pengaruh dengan kontak langsung dengan kebudayaan asing sehingga mempengaruhi komunikasi dan memiliki corak agama dan aksen bahasa itu sendiri, kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda sehingga terbentuk masyarakat yang mengandal laut sebagai sumber kebutuhan hidup dan mata pencarian sama halnya dengan di bidang pertanian dan perkebunan. Keberagaman suku dan bangsa yang ada wilayah di Indonesia merupakan kekayaan dari bangsa Indonesia itu tersendiri. Namun, dari keberagaman suku bangsa yang ada menyebabkan munculnya sikap dan munculnya kedaerahan

dan kesukuan yang berlebihan. Sehingga mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

Seperti halnya konflik di Kalimantan yang bersekala besar antara suku Dayak dan Madura meletus pada tahun 1996. Konflik ini terjadi dalam dua gelombang pada 29 Desember, seorang warga Madura menikam dua orang pemuda Dayak di Ledo, dekat Singkawang (Kalimantan Barat), tampaknya sebagai balas dendam atas sebuah insiden pemukulan pada 6 Desember. Pemukulan yang jadi sumber perkara itu diduga di sulut oleh tindakan pelecehanan warga Madura atas seorang gadis Dayak. Ketika berita penusukan itu menyebar dan desas desus mengenai kematian si pemuda tersiar, beberapa ratus orang mulai menyerang pemukiman Madura, bahkan ada yang membawa poster menuntut pengusiran warga Madura. Pada Januari 1999, kekerasan mendadak dan mengejutkan pecah antara orang-orang Kristen dan Muslim di Provinsi

Maluku Indonesia tadinya terlihat sebagai wilayah stabil Nusantara, dengan cepat ia menjadi tempat perselisihan antar agama yang berakibatkan mengenaskan. Ribuan orang terbunuh dalam spiral kekerasan sepanjang tahun-tahun berikutnya (Jacques, 2002:76).

Teori Konflik dalam pandangan Dahrendorf antara lain: manusia sebagai makhluk sosial mempunyai andil terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial; masyarakat selalu dalam keadaan konflik menuju perubahan sosial (Mrawan, 2012:87). Konflik etnik disebabkan beberapa faktor sebagai berikut: pertama, munculnya etnosentrisme, kedua keabsahan teritorial khususnya bagi etnik pendatang yang mendiami wilayah bangsa lain kelompok etnik asli melakukan operasi pembersihan (*ethnic cleansing*) bagi etnik pendatang, adanya stereotipe negatif yang muncul terhadap etnik tertentu diwariskan secara turun temurun sehingga citra atau *image* dari etnik tersebut selalu buruk, adanya deskriminasi yang terjadi terhadap kelompok etnik tertentu sehingga menimbulkan prasangka ketidakadilan, adanya kesenjangan sosial yang terjadi antar etnik (Wnarno, 2014:249).

Masyarakat Indonesia perlu adanya membentuk, nasionalisme sendiri diartikan merupakan suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bagi suatu polulasi, yang jumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu bangsa yang aktual atau bangsa yang potensial (Wnarno, 2014:244). Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia (Illahi, 2012:5).

Terbentuk dari beragam suku yang tersebar disepanjang kepulauan yang luas, pada mulanya ia hanyalah suatu visi guna mendirikan pemerintahan yang baru yang

akan menyatukan kelompok-kelompok yang bertalian etnis, ukuran kontak dengan dunia modern, dan pengalaman dengan penguasa kolonial. Nasionalisme merupakan prinsip pengelolaan fundamental yang menghubungkan bangsa dan negara. Pandangan keras mengenai nasionalisme melihatnya sebagai suatu prinsip atau ideologi yang mendektekan koinsidensi antar negara dan bangsa yang didefinisikan dalam bentuk ketentuan-ketentuan etnis (Jacques, 2002:26).

Penulisan ini bersifat deskriptif naratif yaitu penulisan sejarah yang memiliki kerangka berfikir yang dituangkan dalam bentuk deskriptif narasi. Secara metodologi sejarah dalam penelitiannya harus menggunakan metode sejarah dalam mendapatkan data, perlu diketahui dalam menguraikan metode penelitian tidak sekedar memaparkan maksud atau pengertiannya tetapi lebih pada hal-hal yang konkret berkenaan data yang digunakan. Metode sejarah, yakni: 1) Heuristik, ialah kegiatan menghimpun sumber-sumber sejarah; 2) Kritik (verifikasi) meneliti apakah sumber-sumber itu sejati, baik bentuk maupun isinya; 3) Interpretasi, untuk menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-fakta yang diverifikasi; 4) Histografi, penyajian hasil sintesis yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah sejarah (Daliman, 2002:209).

B. KONFLIK ETNIS DI KALIMANTAN TAHUN 1996-1999

Model kebangsaan Indonesia telah melahirkan kategori kelompok-kelompok yang tersingkirkan dan terpinggirkan. Pada titik simpang kritis ketiga yang neyertai akhir rezim Orde Baru, sebagian kelompok tersebut adalah para peserta korban dari kekerasan etnis. Suku Dayak yang terpinggirkan berperang melawan para pendatang suku Madura di pulau Kalimantan pada tahun 1996-1999. Mereka yang terpinggirkan meliputi

sejumlah besar kelompok yang dianggap komunitas-komunitas suku atau terpencil. Istilah Dayak bersifat kolektif dan sering membingungkan, karena jumlah mereka ratusan kelompok di Kalimantan dan satu sama lain dihubungkan dengan bahasa dan budaya. Kebanyakan orang-orang Dayak di Kalimantan Barat adalah peladang berpindah yang menanam padi sambil memperoleh hasil hutan untuk kehidupan mereka seperti karet, durian. Sebagian besar orang Dayak beragama Khatolik dan Protestan yang secara khusus merupakan suatu jaringan yang kuat di daerah itu, tetapi juga mempertahankan tradisi dan kepercayaan mereka. Orang-orang Madura pertama kali datang di Kalimantan Barat sekitar pergantian abad ke-19 dalam jumlah sedikit, jumlah mereka bertambah ketika diperkerjakan sebagai kuli kontrak untuk membuka hutan dan perkebunan.

Mulai tahun 1970-an mereka datang dengan jumlah yang lebih banyak. Kebanyakan orang Dayak mengatakan mereka merasa tidak aman hidup bersama orang-orang Madura. Secara umum orang Madura yang datang di Kalimantan Barat membawa tradisi dan sifat mereka, seperti membawa senjata tajam, membunuh (seorang polisi bernama Robert dibunuh di Singkawang pada tahun 1979), mencuri (seorang Madura mengambil ikan dalam bubu salah satu warga desa Samalantan), dan memaksa kehendak mereka terhadap orang lain. Sebagai contoh, di kota bila ada penumpang potensial yang tidak ingin naik becak atau taksi air (sampan) mereka, ia akan ditarik, didorong dan ditakut-takuti dengan pisau. Di desa juga demikian, para petani Dayak tidak dapat lagi menyimpan hasil panen padi mereka diladang. Mereka tidak dapat meninggalkan rumahnya tanpa menguncinya. Padi, buah-buahan, ternak, dan sepeda sering hilang. Singkatnya kehidupan masyarakat biasa dan masyarakat Dayak secara khusus tidak aman lagi.

Salah satunya gelombang kerusuhan bersifat lebih luas dan lebih maut. Ketegangan terus berlangsung tinggi selama Januari dan insiden-insiden terpisah terus terjadi . dibakar oleh desas desus dan suatu serangan terhadap rumah-rumah dan sebuah mesjid oleh gelombang suku Dayak, pada 28 Januari sekelompok warga madura menyerang sebuah sekolah Katolik dan menikam gadis Dayak. Di kabupaten Salamantan, sekelompok warga Madura membakar sejumlah millik orang-orang Dayak, yang sebagian adalah pegawai negeri. Ada tiga dalil utama ditawarkan untuk menjelaskan konflik tersebut. penjelasan budaya menekankan pada hubungan yang secara khusus saling tak bersesuaian antara suku Dayak, yang menganggap bahwa penumpahan darah dilihat sebagi serangan terhadap seluruh komunitas, dengan warga Madura yang gampang menempuh perkelahaian bersenjata tajam. Sebagai tambahan, salah satu varian penjelasan ini berpendapat bahwa suku Madura khususnya tidak menghormati nilai-nilai Dayak dan adat istiadat setempat. Meski pembentukan stereotipe mengenai orang Madura tersebut suku yang gampang melakukan kekerasan dan mudah marah memiliki dasar dalam kenyataan, ia dibentuk perlahan-lahan melalui insiden berulang yang lebih-lebihkan dan terdistorsi.

C. KONFLIK DI MALUKU TAHUN 1999

Adanya pergeseran paradigma pemahaman tentang agama dari idealitas kehistoritas, dari doktrin keentitas sosiologis dan dari diskursus esensi ke arah eksistensi menyebabkan terciptanya sentimen agama sebagai pemicu konflik Ambon Maluku tahun1999. Terbentuknya pasukan laskar jihat dan RMS. Sebagai aliran radikal telah merusak sendi-sendi kerukunan beragama berbasiskearifan lokal "*pella-gandong*". Penyebaran agama Islam di Maluku Tengah

terjadi melalui jalur perdagangan yang menyusuri pesisir utara pulau Ambon. Agama Islam tersebar dari Jazirah Hunimua (beradadi Ujung utara pulau Ambon) sampai Lebih Pada Januari 1999 kekerasan mendadak dan mengejutkan pecah antara orang Kristen dan muslim di provinsi Maluku Indonesia (Etes, 2013:12).

Masyarakat Ambon Maluku telah tercipta sebagai sebuah daerah di Indonesia dengan corak masyarakat yang plural (*pluralistic society*). Pluralitas masyarakat Ambon ditandai dengan ciri yang bersifat horizontal dan vertikal. Ciri horizontal terlihat pada kenyataan adanya kesatuan-kesatuan social yang berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, agama, adat, dan sifat-sifat kedaerahan dalam bentuk kearifan lokal (*pella-gandong*). Ciri vertikal masyarakat Ambon adalah diubahkannya kepercayaan *Samanisme* ke bentuk agama *Abrahamik* dalam aspek *genealogis*. Saat ini, kemajemukan berkembang cepat seiring dengan pembangunan Ambon. Ambon yang tadinya homogeny, tiba-tiba berkembang menjadi heterogen.

Hal ini kurang diimbangi dengan kelancaran komunikasi antara sesama kelompok masyarakat, bahkan sebagian kelompok masyarakat menjadi asing bagi masyarakat lainnya, meskipun tinggal di wilayah yang sama. Akibatnya muncul dan berkembang rasa saling curiga. Keadaan seperti ini akan semakin sulit jika jembatan komunikasi di antara pemuka agama dan tokoh masyarakat kurang atau tidak tersedia. Kegagalan berkomunikasi dan ketidakmampuan mengelola perbedaan dengan baik, mengakibatkan krisis yang semestinya dapat diredam, justru berkembang menjadi lebih besar dan sulit untuk ditanggulangi. Melalui komunikasi aktif dari pemerintah dan semua unsur *stakeholder* dalam mesosialisasikan peraturan perundang-undangan sampai ke akar rumput (*grassroots*)

diharapkan menjadi jembatan emas menuju kerukunan abadi. Pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama pasca konflik tahun juga direalisasikan melalui sikap solidaritas kemasyarakatan yang majemuk dalam pranata sosial *pella-gandong* yang bersinergi dengan nilai-nilai agama baik yang dianut Kristen, Islam maupun Hindu dan Budha (Johnatan, 2013:15).

Konflik tersebut adalah konsekuensi dari kebijakan-kebijakan Orde Baru yang mengacaukan keseimbangan kekuatan diantara dua komunitas. termasuk salah satu dia antara sedikit di wilayah dimana kedua komunitas agama hampir sebanding jumlahnya, Maluku adalah tempat suatu persaingan kekuasaan diam-diam dan rawan antara orang-orang Kristen dan Muslim. Jejaring patrimonial mempertegas identitas kelompok, ketika posisi-posisi pelayanan sipil yang kuat dan menguntungkan menjadi sumber utama dari sumber daya dan perlindungan bagi masing-masing komunitas agama. Di bawah Orde Baru, akses kepada jaringan-jaringan semacam itu merupakan salah satu dia antara sedikit saluran yang bisa digunakan oleh kelompok-kelompok untuk memajukan kepentingan mereka. Identitas agama memainkan peran kuat dalam persaingan untuk posisi-posisi di Maluku.

Persaingan ini terjadi di balik hubungan yang dari luar tampak tenang dan santun. Hubungan darah diciptakan diantara desa-desa Kristen dan muslim sebagai pengakuan atas kesamaan asal-usul mereka. Lembaga tradisional ini, "pela gandong" memang dirancang untuk menjamin perdamaian diantara kelompok-kelompok agama yang berbeda. Pada Januari 1999 kekerasan mendadak dan mengejutkan pecah antara orang Kristen dan muslim di provinsi Maluku Indonesia. Konflik tersebut adalah konsekuensi dari kebijakan-kebijakan Orde Baru yang mengacaukan keseimbangan kekuatan diantara dua komunitas termasuk

salah satu dia antara sedikit di wilayah dimana kedua komunitas agama hampir sebanding jumlahnya, Maluku adalah tempat suatu persaingan kekuasaan diam-diam dan rawan antara orang-orang Kristen dan Muslim . Jejaring patrimonial mempertegas identitas kelompok, ketika posisi-posisi pelayanan sipil yang kuat dan menguntungkan menjadi sumber utama dari sumber daya dan perlindungan bagi masing-masing komunitas agama. Di bawah Orde Baru, akses kepada jaringan-jaringan semacam itu merupakan salah satu dia antara sedikit saluran yang bisa digunakan oleh kelompok-kelompok untuk memajukan kepentingan mereka. Identitas agama memainkan peran kuat dalam persaingan untuk posisi-posisi di Maluku. Persaingan ini terjadi di balik hubungan yang dari luar tampak tenang dan santun. Hubungan darah diciptakan diantara desa-desa Kristen dan muslim sebagai pengakuan atas kesamaan asal-usul mereka. Lembaga tradisonal ini, "pela gandong" memang dirancang untuk menjamin perdamaian diantara kelompok-kelompok agama yang berbeda.

D. KONFLIK ETNONASIONALIS ACEH 1999

Pada tahun 1953-1962 terjadi pemberontakan yang pertama di Aceh yakni pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Teungku Daud Beure'uh.⁵ Pemberontakan ini terjadi akibat kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah Indonesia karena Aceh tidak diberi otonomi dengan penerapan syariat Islam seperti yang telah dijanjikan Presiden Soekarno, tetapi justru kemudian dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatra Utara. Selain itu kekecewaan rakyat Aceh semakin diperburuk dengan disingkirkannya Teungku Daud Beure'uh oleh pemerintah pusat. Setelah pemberontakan DI/TII pada tahun 1953 kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat kembali terefleksikan dalam

pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diproklamasikan pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Hasan Tiro. Namun, berbeda dengan Teungku Daud Beure'uh, Hasan Tiro tidak menempatkan Islam sebagai misi utama, melainkan nasionalisme dan patriotisme Aceh.

Keputusan pemerintah menggunakan kekuatan bersenjata mengatasi resistensi seperti ini merupakan suatu kejadian yang mengandung kemungkinan resiko tinggi bagi ketentraman dan keselamatan rakyat. Keputusan untuk mengatasi pemberontakan DI/TII tahun 1953 serta pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, tahun 1989 sampai 1999, telah membawa ribuan korban, baik aparat pemerintah Indonesia maupun rakyat Aceh. Pola keputusan pemerintah semacam ini terutama kebijakan pemerintah yang dibuat pada tahun 1989 sampai 1998, telah menyalurkan energi sekelompok komunitas Aceh kearah pemberontakan. Dalam memahami konflik Aceh perlu diketahui bahwa konflik Aceh adalah konflik yang multidimensional (Astoria, 2014:15).

Integrasi Aceh ke dalam republik Indonesia memperlihatkan baik suatu derajat ketaatan terhadap konsep bangsa Indonesia yang laur biasa maupun identitas kedaerahan yang kuat. Orang-orang Aceh bergabung dengan republik dari suatu titik tolak yang berbeda dibanding banyak daerah-daerah lain. Mereka pengertian komunitas yang khas melalui kejayaan masa silam sebagai suatu kekuatan regional, perlawanan mereka terhadap Belanda, serta identitas Islam mereka yang kuat. Namun, kelompok elite yang memperoleh sebagian besar kekuasaan dan dukungan popular pada masa surutnya kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap republik. Ketika pemerintah republik dipaksa untuk mundur karena desakan kedatangan Belanda, orang-orang Aceh membentuk suatu pemerintahan daerah yang

kuat dan merupakan salah satu benteng republik.

Kekuasaan otoriter di bawah demokrasi dipimpin dan Orde Baru mempersempit paksaan institusional terhadap Aceh dan mempromosikan integrasi yang lebih besar ke dalam model nasional Indonesia. Status khusus Aceh dengan cepat pudar akibat sentralisasi kekuasaan politik, ekonomi dan militer. Model ini telah menciptakan ketegangan tersendiri yang tak bisa dipertahankan. Tanggapan di Aceh telah menimbulkan maraknya kekerasan. Karena orang aceh telah dikalahkan dalam pemberontakan Darul Islam, memiliki rasa identitas komunal yang kuat, dan telah diberi status istimewa, mereka bereaksi lebih negative sebanding tempat dan terhadap penggunaan kekuatan militer untuk menumpas oposisi. Dalam setiap krisis di Aceh, militer meningkatkan pendekatan represifnya, yang berdampak langsung meningkatkan dukungan terhadap penggunaan kekuatan militer untuk menumpas oposisi.

E SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan konflik sebagaimana konsensus merupakan realitas social yang terdapat di dalam masyarakat, konflik merupakan unsur dasar di kehidupan masyarakat. Pada titik simpang kritis ketiga yang menyertai akhir rezim Orde Baru, sebagian kelompok tersebut adalah para peserta korban dari kekerasan etnis. Suku Dayak yang terpinggirkan berperang melawan para pendatang suku Madura di pulau Kalimantan pada tahun 1996,1999. Mereka yang terpinggirkan meliputi sejumlah besar kelompok yang dianggap komunitas-komunitas suku atau terpendil. Konflik tersebut adalah konsekuensi dari kebijakan-kebijakan Orde Baru yang mengacau kan keseimbangan kekuatan diantara dua komunitas .termasuk salah satu dia antara

sedikit di wilayah dimana kedua komunitas agama hampir sebanding jumlahnya, Maluku adalah tempat suatu persaingan kekuasaan diam-diam dan rawan antara orang-orang Kristen dan Muslim.

Jejaring patrimonial mempertegas identitas kelompok, ketika posisi-posisi pelayanan sipil yang kuat dan menguntungkan menjadi sumber utama dari sumber daya dan perlindungan bagi masing-masing komunitas agama. Masyarakat Indonesia Perlu adanya membentuk, nasionalisme sendiri diartikan merupakan suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bagi suatu polulasi, yang jumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu bangsa yang actual atau bangsa yang potensial (Winarso, 2014:244).

DAFTAR PUSTAKA

- Asteria. 2014. *Situasi Dan Kondisi Aceh Sebelum Dijadikan Daerah Operasi Militer Tahun 1989-1998*. (Online Diakses eprints.uny.ac.id tanggal 12 Mei 2017).
- Daliman. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Etes. 2013. *Hubungan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Pasca Konflik Tahun 1999 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah*. (Online Diakses dari journal.ugm.ac.id tanggal 12 Mei 2017).
- Ilahi, Muhamad Takdir. 2012. *Nasionalisme Dalam Bidang Pluralisme Bangsa Paradigma: Pembangunan Dan Kemandirian Bangsa*. Yogyakarta: Ar Ruzz.

- Jacques, Bertrand. 2002. *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Johnatan. 2013. *Konflik Antar Etnis (Dayak-Madura) Di Salamantan, Kalimantan Barat 1996-1997*.(Online Diakses dari www.e-jurnal.com tanggal 12 Mei 2017).
- Winamo, Budi. 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.
- Wirawan. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana.